

RINGKASAN

**Nabilla Sandra
(210510138)**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI
SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

(Studi Putusan No. 36/PDT. G/2021/PN MKS)

(Dr. Ramziati, S.H., M. Hum dan Fitri Maghfirah, S.H., M.H)

Dalam pewarisan menurut KUHPerdato ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) hanya diakui bagi keturunan sah dalam garis lurus ke bawah sesuai dengan ketentuan Pasal 841 hingga Pasal 848 KUH Perdata. Namun demikian, ditemukan penyimpangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks, di mana majelis hakim menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis terkait dengan bagaimana kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta akibat hukum terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pewarisan perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti, menganalisis dan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan, khususnya dalam kaitannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian isi putusan dengan norma-norma hukum waris perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks bertentangan dengan ketentuan KUHPerdato karena menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti. Padahal, menurut Pasal 841–848 KUHPerdato, penggantian hanya diperbolehkan bagi keturunan sah dalam garis lurus ke bawah. Hakim mempertimbangkan Pasal 830, 832, dan 852 KUHPerdato mengenai terbukanya warisan, hubungan darah, serta golongan-golongan ahli waris, namun mengabaikan syarat hubungan darah dalam penggantian. Pasal 311 RBg digunakan sebagai dasar menerima dalil gugatan karena tidak dibantah tergugat. Akibatnya, putusan ini menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum waris perdata.

Disarankan hakim tidak hanya menjadikan sikap pasif tergugat sebagai dasar utama pertimbangan, melainkan tetap berpegang pada ketentuan normatif KUHPerdato, agar asas keadilan dan kepastian hukum terpenuhi dan tidak merugikan pihak-pihak yang secara hukum lebih berhak atas warisan.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti, Istri, KUHPerdato, Harta Warisan

SUMMARY

**Nabilla Sandra
(210510138)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE WIFE'S STATUS
AS A SUBSTITUTE HEIR IN THE DISTRIBUTION OF
INHERITANCE ACCORDING TO THE INDONESIAN
CIVIL CODE***

(A CASE STUDY OF DECISION NO. 36/PDT.G/2021/PN MKS)
(Dr. Ramziati, S.H., M. Hum and Fitri Maghfirah, S.H., M.H)

In inheritance according to the Civil Code, substitute heirs (bij plaatsvervulling) are only recognized for legal descendants in a straight line down in accordance with the provisions of Article 841 to Article 848 of the Civil Code. However, a deviation was found in the Makassar District Court Decision Number 36/Pdt.G/2021/PN Mks, in which the panel of judges determined the wife of the testator's sibling as a substitute heir. The decision raises juridical questions related to how the wife's position as a substitute heir, the basis for legal considerations used by the judge in making the decision, and the legal consequences on the principles of justice and legal certainty in the civil inheritance system.

This research aims to determine the juridical position of the wife as a substitute heir, analyze and examine the legal considerations used by the judge in the decision, and to determine the legal consequences, especially in relation to the principles of justice and legal certainty.

The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data is obtained through literature study which includes primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively to assess the suitability of the contents of the decision with the norms of civil inheritance law.

The results showed that the judge's decision in case No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks was contrary to the provisions of the Civil Code because it determined the wife of the testator's sibling as a substitute heir. In fact, according to Articles 841-848 of the Civil Code, replacement is only allowed for legal descendants in a straight line down. The judge considered Articles 830, 832, and 852 of the Civil Code regarding the openness of inheritance, blood relations, and classes of heirs, but ignored the requirement of blood relations in replacement. Article 311 RBg was used as the basis for accepting the claim because it was not refuted by the defendant. As a result, this decision deviates from the principles of justice and legal certainty in civil inheritance law.

It is recommended that judges not only make the passive attitude of the defendant the main basis for consideration, but stick to the normative provisions of the Civil Code, so that the principles of justice and legal certainty are fulfilled and do not harm parties who are legally more entitled to inheritance.

Keywords: *Substitute Heir, Wife, Civil Code, Inheritance,*